

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alatas, S. H. (1975). *Sosiologi Korupsi*. LP3ES.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (1986). *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya* (2nd ed.). Gramedia.
- Andi Hamzah. (2002). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi diberbagai Negara* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Arsyad Hafidz, J. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Sinar Grafika.
- Chaerudin., Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi/ Chaerudin; (Syaiful Ahmad Dinar*. P.T Refika Aditama.
- Elwi, D. (2014). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. In *PT. Raja Grafindo Persada*. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bag: Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Kholis, E. L. (2010). *Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*. Solusi Publishing.
- Kholis Laila, E. (2003). Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Peradilan Pidana Terpadu Sistem atau Sekedar Proses. *Media Hukum*, 1.2(8), 28.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Kompas.
- Mintargo, B. S. (1993). *Tinjauan Manusia dan Nilai Budaya*. Universitas Trisakti.
- Pendidikan Anti Korupsi*. (2016). Sinar Grafika.

Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, & Wirjono. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.

Eresco.

Simonangkir, J. C. . (2010). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan hukum*. Raja

Grafindo Persada.

Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Sudiharsa, K. (2011). *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*. Sinar Grafika.

Surachmin & Suhandi Cahaya. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010

Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak

Pidana Khusus

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

### C. SUMBER LAIN-LAIN

- Amelia, R., Yuningsih, H., & Nurillah, I. (2021). *Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Oleh Terpidana Kasus Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang* [Universitas Sriwijaya].
- Angita, A. B., & Hidayat, D. (2018). Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Melakukan Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara Korupsi Di Kabupaten Cirebon). *Hukum Responsif*, 9(2), 49–58.
- Angkasa, N. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotik. *Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, 1, 43.
- Budiman, M. (2021). Tatangan dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini. *Syntax Idea*, 3(10), 2157.
- Effendy, M. (2003). Strategic Action Plan dalam Upaya Merespon Kebijakan Jaksa Agung R.I. tentang Peningkatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Media Hukum*, 2(8).
- Genova Damanik, K. (2016). Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 4–5.
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(02), 87–93.
- Nurisman, E., & Fitriano, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4, 716.
- Putri, D. (2022). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V, 49–50.

- Ramelan. (2004). Teknik Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Media Hukum*, 2(1).
- Santoso, A. N. (2021). *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Temanggung)* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). *PAMPAS : Journal of Criminal Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Author 's Email Correspondence : Trinada71@gmail.com Tentang Pemberantasan Tindak Pid. 2*, 54–67.
- Sidabutar, L. M. J. (2019). Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 75–86.
- Simanullang, N. A. (2017). Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 5(7), 70.
- Soebiantoro, H. (2004). Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Hukum*.
- Sukendar, S., Munzil, F., & Wr., I. R. (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 25–53.

- Sundhana, H. (2020). Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi ( Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ). *UNES Law Review*, 2(3), 259–268.
- Upriyadi, D. (2017). Ensiklopedia Antikorupsi. In *Antikorupsi* (p. 22). Borobudur Inspia Nusantara.